LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DAIRI

JL. Pandu Kel. Bintang Hulu Kec. Sidikalang (Kode Pos) 22212
Telepon (0627) 21265, FAX (0627) 21265

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi tahun 2024. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan kegiatan pada akhir periode pengukuran.

Selama tahun 2024, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang terdiri dari 3(tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) serta 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kunci (IKK). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada tahun 2024. Keberhasilan/kegagalan program, permasalahan dan solusi serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi selama tahun 2024 dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja kedepan secara produktif, efektif dan efisien baik dari akses perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,



IWAN TARUNA BERUTU, S.T, M.Si
NIP. 19750831 200312 1 003

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi tahun 2024 ini disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Dairi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi yang telah disepakati antara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi dengan Bupati Dairi.

IKU OPD	SATUAN	TARGET CAPAIAN			
		2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan omset IKM	Persen	-	-	10	10
Persentase peningkatan pendapatan sektor perdagangan	Persen	-	-	8	8,5
Persentase peningkatan omset koperasi aktif	Persen	-	-	5,5	5,5

Persentase peningkatan omset UMKM Binaan	Persen	-	-	7	7
Predikat SAKIP	Predikat	B	B	BB	BB

Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi melaksanakan program sebagai berikut dengan pagu anggaran sesuai data perubahan APBD Kab. Dairi Tahun 2024 :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 56.754.250,-
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 206.705.750,-
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 595.463.250,-
4. Program Pengembangan UMKM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 437.500.000,-
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.088.260.856,-
6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan pagu anggaran sebesar Rp. 292.060.000,-
7. Program Pengembangan Ekspor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 160.372.108,-

8. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-
9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 107.856.000,-
10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.715.437.324,-

BAB I
PENDAHULUAN

I. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi merupakan organisasi perangkat daerah yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Dairi. Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi. Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
d. pelaksanaan administrasi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas dibantu Unit Pelaksana Teknis sebanyak 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis sesuai rincian tugasnya. UPT yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah UPT. Metrologi Legal dan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.

Sumber Daya Manusia

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2024 memiliki jumlah pegawai 27 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1.

SDM aparat Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Dairi dilihat dari tingkat pendidikan serta pelatihan teknis maka kualitas SDM tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas, hal ini terlihat bahwa 8% (2 Orang) berpendidikan S2 dan 69% (18 Orang) SDM berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 (Sarjana Muda) 15% (4 Orang) dan 8% (2 Orang) berpendidikan SLTA, dengan 73% (19 Orang) adalah Golongan III dan 23% (6 Orang) adalah Golongan IV sedangkan sisanya 4% (1 Orang) adalah Golongan II.

Daftar Kualifikasi, Jumlah Pegawai dan Sumber Daya Manusia
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan			
	Laki-Laki	Perempuan	I	II	III	IV	SMA	Diploma	Sarjana	Pasca Sarjana
Kepala Dinas	1					1				1
Sekretariat	2	5		1	6		1	4	2	
Bidang Koperasi dan UKM	2	1			2	2			3	1
Bidang Perindustrian	1	2			2	1			3	
Bidang Pengembangan Perdagangan	5	0			4	1	1		4	
Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan	2	2			3	1			4	
UPT. Metrologi Legal	1	1			2				2	
Jumlah PNS	14	11		1	19	6	2	4	18	2
Jumlah Tenaga Honor	5	5					1	5	4	

Pada hakekatnya pembangunan Kabupaten Dairi ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan kebijakan program pengembangan industri, baik kecil dan menengah yang benar-benar dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat yang akan berdampak pada kesejahteraan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Dengan demikian secara perlahan akan sangat bermanfaat pada pengentasan kemiskinan.

Potensi industri di Kabupaten Dairi cukup memadai, hal ini sejalan dengan perkembangan Kabupaten Dairi. Industri yang berkembang di Kabupaten Dairi dengan adanya potensi alam yang dimilikinya adalah industri hasil pertanian, perkebunan, hasil olahan hutan dan industri bahan bangunan dan hasil laut. Sedangkan industri lainnya yang berkembang adalah industri makanan dan industri untuk keperluan rumah tangga.

Industri Kecil dan Menengah yang ada di wilayah Kabupaten Dairi pada umumnya masih dikelola secara tradisional baik teknis produksi maupun manajemen produksinya hingga sampai dengan manajemen pemasarannya, yang masih perlu pengembangan peningkatan variabel-variabel produk tersebut sehingga terjadinya pengembangan produk dan pengembangan pasar tujuan produk.

Dalam rangka penerapan dan penguasaan teknologi industri kecil dan menengah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi yang merupakan salah satu instansi teknis yang membina sektor ekonomi daerah telah dan akan melakukan upaya–upaya baik bagi industri yang baru maupun yang sudah berkembang.

Upaya-upaya tersebut antara lain adalah usulan program-program untuk memberikan pelatihan teknologi produksi, penyuluhan dan studi banding, magang ke perusahaan yang telah maju diluar daerah, serta bantuan modal kerja dan peralatan bagi industri kecil dan menengah. Walaupun upaya-upaya tersebut akan membutuhkan kerja keras dan ketersediaan anggaran untuk bisa memberikan pergeseran ekonomi mikro di Wilayah Kabupaten Dairi. Alokasi anggaran Kabupaten Dairi belum mampu sepenuhnya untuk mencapai tujuan pembangunan di sektor ekonomi khususnya industri kecil dan menengah. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah dituntut untuk melaksanakannya secara bersih dan transparan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pemerintah harus melibatkan semua unsur dan oknum yang terkait dalam pembangunan tersebut. Semenjak bergulirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan desentralisasi tersebut menuntut Pemerintah Daerah

untuk mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada *good government* dan *clean governance* dimana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Tuntutan atas pelaksanaan tugas yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) terus meningkat. Oleh karenanya semua kegiatan pembangunan yang diselenggarakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Sesuai dengan azas akuntabilitas yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir suatu kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

II. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

1. Adaptasi atas Perubahan Lingkungan Strategik

   Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategis, sehingga instansi akan

mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan Keberhasilan

   Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.

3. Orientasi ke Masa Depan

   Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah pengetahuan / masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Pelayanan Prima

   Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

III. ISU STRATEGIS

Bidang Industri

Hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan daerah pada dasarnya merupakan salah satu implementasi dari kebijakan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan daerah. Hilirisasi (industri hilir) merupakan aktifitas atau kegiatan pengolahan berbasis bahan baku sumber daya alam dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan menghindari ekspor sumber daya dalam bentuk primer (bahan mentah). Pengembangan hilirisasi industri selain diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk, juga dapat meningkatkan penguatan dan pengembangan struktur industri, meningkatnya penterapan tenaga kerja, meningkatnya pertumbuhan dan aktifitas ekonomi sub sector ekonomi lainnya, berkembangnya wilayah industri, terciptanya alih teknologi serta penghematan dan peningkatan devia. Mengingat hal itu, maka kondisi potensi sumber daya alam, utamanya potensi produksi sumber daya alam terbarukan sebagai sumber daya bahan baku industri merupakan landasan utama pentingnya hilirisasi industri pengolahan berkelanjutan.

Kabupaten Dairi sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dengan keragaman sumber daya hayatinya, khususnya sumber daya hayati berbasis komoditas pertanian dan perkebunan, tanaman pangan dan holtikultura, serta komoditas perikanan, menjadikan hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan daerah berbasis komoditas

pertanian, perkebunan dan perikanan merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung dan mendorong percepatan tujuan pembangunan khususnya dalam hal terwujudnya daya saing ekonomi berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan terutama dalam upaya mencapai tujuan meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, menurunnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah (kontribusi industri pengolahan non migas).

Dengan demikian, hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan daerah berbasis agro diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian kerakyatan berbasis sumber daya alam di Kabupaten Dairi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan daerah Kabupaten Dairi diarahkan pada :

a. Industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra – sentra produksi bahan baku serta lingkungan dan sarana penunjangnya.
b. Penguatan dan meningkatkan kinerja industri pengolahan skala UKM/IKM yang didukung oleh industri pengolahan skala besar.
c. Pengembangan industri berbasis komoditas unggulan yang mampu meningkatkan nilai tambah, peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja serta daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan.

Untuk itu, dalam rangka percepatan dan optimalisasi pencapaian tujuan hilirisasi, skala prioritas pengembangan

hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan daerah Kabupaten Dairi menjadi sangat penting. Hal ini penting dilakukan dengan harapan hilirisasi industri pengolahan produk unggulan daerah dapat menjadi pendorong pengembangan industri agro berbasis komoditas unggulan daerah serta diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk agro, peningkatan penyerapan tenaga kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat dan peningkatan daya saing perekonomian daerah Kabupaten Dairi secara berkelanjutan.

Bidang Perdagangan

Dalam upaya pengembangan perdagangan dan peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah, ditemui berbagai permasalahan yang cukup mendasar, diantaranya adalah :

1. Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting terutama di daerah yang jauh dari ibukota kabupaten menjadikan kebutuhan pokok dan barang penting sebagian besar masih dipasok dari luar daerah yang berbatasan langsung.
2. Penataan PKL masih belum tersentuh secara optimal.
3. Kurang lancarnya informasi harga dari kabupaten/kota
4. Masih ditemukan barang-barang yang beredar yang tidak layak jual dan tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, seperti SNI dan kadaluarsa.
5. Kurangnya SDM, sarana dan prasarana kemetrologian sesuai UU No. 23 Tahun 2014.

6. Masih adanya disparitas harga menjelang Hari-hari Besar Keagamaan.
7. Masih rendahnya pemanfaatan informasi /akses pasar luar negeri.
8. Terbatasnya kemampuan SDM UKM ekspor.
9. Rendahnya daya saing produk ekspor yang terbaharui.
10. Rendahnya daya saing pelaku usaha Kabupaten Dairi dengan daerah lain baik dari aspek kualitas komoditi maupun kuantitas.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Isu mendasar adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pembagian urusan dimana salah satunya pembagian urusan koperasi dan UKM yang mengatur kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu lainnya seperti aspek kelembagaan, aspek produksi, aspek pembiayaan, aspek pemasaran dan aspek kapasitas sumber daya manusia (SDM). Permasalahan yang dihadapi di koperasi dan UKM Kabupaten Dairi antara lain :

1. Terbatasnya akses koperasi dan UKM terhadap sumber-sumber pembiayaan.
2. Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UKM baik dari segi kemasan, perijinan, kontinuitas atau kualitas produk yang mengakibatkan terbatasnya akses pasar.
3. Kurangnya kemampuan SDM koperasi dan UKM dalam penguasaan teknologi informasi mengakibatkan

terlambatnya UKM dalam mengakses informasi terkait dengan pengembangan usaha.

4. Kompetensi tenaga pendamping masih sangat terbatas mengingat salah satu persyaratan untuk tenaga pendamping adalah sarjana atau D3. Sedangkan di Kabupaten Dairi, kebanyakan sarjana/D3 masih berorientasi menjadi PNS atau karyawan perusahaan. Apalagi untuk pelaksanaan pendampingan di daerah terpencil dan perbatasan masih kurang dukungan ketersediaan SDM pendamping yang berkompeten.
5. Dalam rangka revitalisasi koperasi, dilaksanakan beberapa upaya untuk mewujudkan koperasi yang aktif dan berkualitas yang meliputi : rehabilitasi, re-organisasi dan pengembangan. Khusus Pelaksanaan rencana pembubaran koperasi tidak aktif berdasarkan *Online Data System,* Kementerian Koperasi mengalami kendala karena beberapa koperasi tidak aktif tersebut masih mempunyai pinjaman program pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.
6. Pelaksanaan program penumbuhan wirausaha baru yang meliputi pelaksanaan diklat, bantuan peralatan produksi dan pendampingan usaha masih mengalami beberapa kendala antara lain terbatasnya anggaran dan waktu diklat sehingga materi yang disampakan belum dapat dikuasai dan dipraktekkan oleh peserta secara maksimal. Selain itu SDM UKM yang belum menguasai managemen usaha dengan baik, menyebabkan usaha tidak dapat berkembang secara optimal. Untuk itu

diperlukan juga adanya program pendampingan Wira Usaha Baru (WUB) agar diberikan alokasi anggaran yang mencukupi.

7. Terbatasnya kemampuan para pendamping dalam melakukan pendampingan koperasi dan UKM dalam beberapa aspek terutama dalam aspek teknis sehingga pengembangan usaha UMKM belum berjalan optimal.
8. Belum optimalnya pelaksanaan program kemitraan dan CSR bagi UKM dan koperasi
9. Masih banyak koperasi yang belum aktif melakukan RAT padahal kegiatan usaha koperasi berjalan aktif
10. Masih rendahnya pemahaman aparat yang membidangi pengawasan koperasi.
11. Cepatnya perpindahan/mutase aparatur
12. Rendahnya SDM dan tidak adanya Diklat Pengawas Koperasi bagi aparat.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru.

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Dairi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sebagaimana yang telah dituangkan dalam misi 3 Bupati Dairi, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa tujuan dan sasaran disertai dengan indikator pengukurannya yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan strategis dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Sedangkan sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus

pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.

Adapun, tujuan, sasaran beserta indikator kinerjanya, serta program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut target tahunannya disampaikan terlampir dilengkapi pula dengan target tahunannya :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2024	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023

Terlampir 1

Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7

Terlampir 2

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam pengukuran kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang dituangkan dalam rencana strategis, adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2020 – 2024

IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal			Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD			
		2019	2020									
		Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	0,39	0,40	0,39	0,41	0,42	0,43	0,44	-	-	-	-
Persentase KUKM yang menghasilkan produk unggulan	%	1,94	2,51	1,96	3,06	3,56	4,01	4,41	-	-	-	-
Persentase peningkatan omset IKM	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
Persentase peningkatan pendapatan sektor perdagangan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8,5
Persentase peningkatan omset koperasi aktif	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5
Persentase peningkatan omset UMKM Binaan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	B	B	BB	BB

Sumber Data : RPJMD 2019-2024 dan Perubahan RPJMD 2019-2024

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Jumlah koperasi yang melakukan RAT	Unit	25	30	35	40	45	50	-	-	-	-
Jumlah koperasi sehat	Unit	5	10	15	20	25	30	-	-	-	-
Jumlah usaha kecil menengah yang bertumbuh	Unit	1.554	1.594	1.634	1.684	1.744	1.814	-	-	-	-
Jumlah UMKM yang terfasilitasi	Unit	30	40	50	60	70	80	-	-	-	-
Persentase KUMKM yang menghasilkan produk unggulan	%	1,94	2,51	3,06	3,56	4,01	4,41	-	-	-	-
Jumlah pameran/promosi produk daerah	Pameran	6	12	12	12	12	12	-	-	-	-
Jumlah kemitraan antara pedagang Kabupaten Dairi dengan pengusaha diluar Kabupaten Dairi	Kemitraan	2	5	5	5	5	5	-	-	-	-
pcngcmbangan sistcm perdagangan sccara clektronik/ e-commerce	System	0	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Jumlah pasar yang representatif	Pasar	5	6	7	8	9	10	-	-	-	-
Pengawasan penggunaan alat UTTP yang sesuai dengan standar kemetrologian	Unit	500	700	750	800	850	900	-	-	-	-
Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	Unit	500	650	700	750	800	850	-	-	-	-
Jumlah IKM yang terfasilitasi	IKM	8	10	12	14	16	18	-	-	-	-
Jumlah unit usaha industri kecil menengah (IKM)	Unit	728	733	738	743	748	753	-	-	-	-
Jumlah peningkatan kaasitas SDM pelaku usaha IKM	Orang	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
Jumlah Sentra IKM Potensial	Sentra	0	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Konstribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	-	-	-	-
Jumlah IKM yang meningkat teknologi industrinya	IKM	7	10	10	10	10	10	-	-	-	-
Persentase peningkatan koperasi yang	%	33		-	-	-	-		36	39	43

berkualitas											
Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	2,10	2,10	-	-	-	-	2,48	3,21	3,94	4,67
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)	%	70	-	-	-	-	-	-	80	90	100
Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	1	1	-	-	-	-	1	2	2	2
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	-	-	-	-	100	100	100	100

Sumber Data : RPJMD 2019-2024 dan Perubahan RPJMD 2019-2024

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang memuat program/kegiatan serta pagu anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 56.754.250,-
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 206.705.750,-
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 595.463.250,-
4. Program Pengembangan UMKM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 437.500.000,-
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.088.260.856,-
6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan pagu anggaran sebesar Rp. 292.060.000,-
7. Program Pengembangan Ekspor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 160.372.108,-
8. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-

9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 107.856.000,-
10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.715.437.324,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi ini masih banyak ditemukan berbagai hambatan. Hambatan utama yang ditemukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini adalah pengumpulan data kinerja yang ada pada bidang organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja dapat kami sajikan dalam tabel dibawah ini :

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN DAIRI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Indikator Kinerja Kunci	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Meningkatnya Omset IKM	Persentase peningkatan omset IKM	10%	9,1%	91%	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	2%	4,69%	100%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	4.715.437.324	2.283.932.209
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	95%	95%				
2	Meningkatnya Pendapatan Sektor Perdagangan	Persentase peningkatan pendapatan sektor perdagangan	8,5%	8,8%	100%	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)	100%	40%	40%	-	-	-	-
						Persentase kinerja realisasi pupuk	100%	69%	69%	-	-	-	-
						Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	98%	98%	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	30.000.000	27.335.331
										Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk	160.372.108	73.335.690

											Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kab/Kota		
3	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Persentase peningkatan omset koperasi aktif	5,5%	7,3%	100%	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	43%	55%	100%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	56.754.250	48.985.948
										Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	206.705.750	177.360.750

		Persentase peningkatan omset UMKM binaan	7%	6,8%	97%	Persentase peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha	4,67%	6,40%	100%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	595.463.250	493.870.681
4	Meningkatnya Nilai AKIP	Predikat SAKIP	BB	BB	100%	Predikat SAKIP OPD	BB	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	811.708.909	735.545.849

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DAIRI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Meningkatnya Omset IKM	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	2%	4,69%	100%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4.715.437.324	2.283.932.209
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	95%	95%				
2	Meningkatnya Pendapatan Sektor Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)	100%	40%	40%	-	-	-	-
		Persentase kinerja realisasi pupuk	100%	69%	69%	-	-	-	-
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	98%	98%	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	30.000.000	27.335.331
3	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	43%	55%	100%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah	56.754.250	48.985.948

							Kabupaten/Kota		
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	206.705.750	177.360.750
		Persentase peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha	4,67%	6,40%	100%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	595.463.250	493.870.681
	Meningkatnya Nilai AKIP	Predikat SAKIP OPD	BB	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-Administrasi Umum Perangkat Daerah -Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	811.708.909	735.545.849

REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2024

NO.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran Belanja Operasi (Rp)	Pagu Anggaran Belanja Modal (Rp)	Metode Pengadaan	Nilai Kontrak	No dan Tgl Kontrak	Pelaksana Pekerjaan / Rekanan	Tgl Akhir Pekerjaan Sesuai Kontrak	Realisasi Belanja Operasi			Realisasi Belanja Modal			Sisa Pagu	KPA/PPTK	KET
									Fisik (%)	Keu (%)	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	Rp	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**1.296.423.250**	**-**						**55,55%**	**55,55%**	**720.217.379**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**576.205.871**		
1	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**56.754.250**	**-**						**86,31%**	**86,31%**	**48.985.948**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**7.768.302**		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**56.754.250**	**-**						**86,31%**	**86,31%**	**48.985.948**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**7.768.302**		
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	56.754.250	-						86,31%	86,31%	48.985.948	0,00%	0,00%	0	**7.768.302**	Ronal Jon Rio Sinraya Sitopu, SE	DAK NON FISIK, DAU
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**206.705.750**	**-**						**85,80%**	**85,80%**	**177.360.750**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**29.345.000**		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**206.705.750**	**-**						**85,80%**	**85,80%**	**177.360.750**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**29.345.000**		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	206.705.750	-						85,80%	85,80%	177.360.750	**0,00%**	**0,00%**	0	**29.345.000**	Ronal Jon Rio Sinraya Sitopu, SE	DAU
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**595.463.250**	**-**						**82,94%**	**82,94%**	**493.870.681**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**101.592.569**		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**595.463.250**	**-**						**82,94%**	**82,94%**	**493.870.681**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**101.592.569**		
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	126.319.250	**-**						98,40%	98,40%	124.298.850	0,00%	0,00%	0	**2.020.400**	Ronal Jon Rio Sinraya Sitopu, SE	DAK NON FISIK, DAU

	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	155.005.000	-						87,36%	87,36%	135.416.932	0,00%	0,00%	0	**19.588.068**	Manarsar MH. Siburian, SE	DAU
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	314.139.000	-						74,54%	74,54%	234.154.899	0,00%	0,00%	0	**79.984.101**	Ronal Jon Rio Sinraya Sitopu, SE	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**437.500.000**	**-**						**0,00%**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**437.500.000**		
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**437.500.000**	**-**						**0,00%**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**437.500.000**		
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	437.500.000	-						0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	437.500.000	Manarsar MH. Siburian, SE	DAU
II	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**4.508.022.964**	**170.526.000**						**92,14%**	**92,14%**	**4.153.497.985**	**99,87%**	**99,87%**	**170.300.000**	**354.750.979**		
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**160.372.108**	**-**						**45,73%**	**45,73%**	**73.335.690**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**87.036.418**		
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**160.372.108**	**-**						**45,73%**	**45,73%**	**73.335.690**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**87.036.418**		
	Pameran Dagang Nasional	150.072.108	**-**						42,00%	42,00%	63.035.690	0,00%	0,00%	0	87.036.418	George Martin Sitohang, SE	DAU
	Pameran Dagang Lokal	10.300.000	**-**						100,00%	100,00%	10.300.000	0,00%	0,00%	0	-	George Martin Sitohang, SE	DAU
2	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**121.534.000**	**170.526.000**						**97,66%**	**97,66%**	**118.685.656**	**99,87%**	**99,87%**	**170.300.000**	**3.074.344**		
	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**121.534.000**	**170.526.000**						**97,66%**	**97,66%**	**118.685.656**	**99,87%**	**99,87%**	**170.300.000**	**3.074.344**		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	73.444.000	170.526.000						99,59%	99,59%	73.145.656	99,87%	99,87%	170.300.000	524.344	Rinaldo Panggabean, SE	DAU

	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	48.090.000	-						94,70%	94,70%	45.540.000	0,00%	0,00%	0	2.550.000	Sondang Sitohang, S.Sos	DAU
3	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**30.000.000**	**-**						**91,12%**	**91,12%**	**27.335.331**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**2.664.669**		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**30.000.000**	**-**						**91,12%**	**91,12%**	**27.335.331**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**2.664.669**		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,, Tera Ulang	22.468.400	-						90,10%	90,10%	20.244.731	0,00%	0,00%	0	2.223.669	Baginta Jawak, ST	DAU
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	7.531.600	-						94,14%	94,14%	7.090.600	0,00%	0,00%	0	441.000	Baginta Jawak, ST	DAU
4	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**107.856.000**	**-**						98,63%	98,63%	**106.376.600**	0,00%	0,00%	0	**1.479.400**		
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**107.856.000**	**-**						98,63%	98,63%	**106.376.600**	0,00%	0,00%	0	**1.479.400**		
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	107.856.000	-						99,00%	99,00%	106.376.600	0,00%	0,00%	0	1.479.400	Rinaldo Panggabean, SE	DBH - CHT
5	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.088.260.856**	**-**						**93,63%**	**93,63%**	**3.827.764.708**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**260.496.148**		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.276.551.947**	**-**						**94,37%**	**94,37%**	**3.092.218.859**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**184.333.088**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.276.551.947	-						94,37%	94,37%	3.092.218.859	0,00%	0,00%	0	184.333.088	Dornauli Sihombing, A.md	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**267.442.720**	**-**						**89,60%**	**89,60%**	**239.620.720**	**0,00%**	**0,00%**	0	**27.822.000**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.329.600	-						100,00%	100,00%	10.329.600	0,00%	0,00%	0	-	Dornauli Sihombing, A.md	DAU
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76.873.120	-						99,18%	99,18%	76.243.120	0,00%	0,00%	0	630.000	Dornauli Sihombing, A.md	DAU
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.810.000	-						79,82%	79,82%	7.830.000	0,00%	0,00%	0	1.980.000	Dornauli Sihombing, A.md	DAU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.430.000	-						85,21%	85,21%	145.218.000	0,00%	0,00%	0	25.212.000	Dornauli Sihombing, A.md	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**417.904.991**	**-**						**96,03%**	**96,03%**	**401.325.549**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**16.579.442**		

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.114.425	-						83,10%	83,10%	55.773.014	0,00%	0,00%	0	11.341.411	Dornauli Sihombing , A.md	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.790.566	-						98,51%	98,51%	345.552.535	0,00%	0,00%	0	5.238.031	Dornauli Sihombing , A.md	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**126.361.198**	**-**						**74,86%**	**74,86%**	**94.599.580**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**31.761.618**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.361.198	**-**						74,86%	74,86%	94.599.580	0,00%	0,00%	0	31.761.618	Dornauli Sihombing , A.md	DAU
III	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**3.568.901.850**	**1.146.535.474**						**34,69%**	**34,69%**	**1.238.196.735**	**91,21%**	**91,21%**	**1.045.735.474**	**2.431.505.115**		
1	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**3.568.901.850**	**1.146.535.474**						**34,69%**	**34,69%**	**1.238.196.735**	**91,21%**	**0,00%**	**1.045.735.474**	**2.431.505.115**		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**3.568.901.850**	**1.146.535.474**						**34,69%**	**34,69%**	**1.238.196.735**	**91,21%**	**91,21%**	**1.045.735.474**	**2.431.505.115**		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	61.900.000	-						91,78%	91,78%	56.814.000	0,00%	0,00%	0	5.086.000	Erpi Entelina Berutu, SE, MAP	DAU
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.507.001.850	1.146.535.474						33,69%	33,69%	1.181.382.735	0,00%	91,21%	1.045.735.474	2.426.419.115	Erpi Entelina Berutu, SE, MAP	DAK NON FISIK , DAU
TOTAL		**9.373.348.064**	**1.317.061.474**						**65,21%**	**65,21%**	**6.111.912.099**	**92,33%**	**92,33%**	**1.216.035.474**	**3.362.461.965**		

RINGKASAN/IKHTISAR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Program / kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi yang dilaksanakan pada Tahun 2024 :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 56.754.250,- penyerapan sebesar Rp. 48.985.948,- dengan capaian target sebesar 86,31% adapun sisa anggaran sebesar Rp. 7.768.302,- adalah penyerapan maksimal anggaran.
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 206.705.750,- penyerapan sebesar Rp. 177.360.750,- dengan capaian target sebesar 85,80% adapun sisa anggaran sebesar Rp. 29.345.000,- adalah penyerapan maksimal anggaran.
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 595.463.250,- penyerapan sebesar Rp. 493.870.681,- dengan capaian target sebesar 82,94% adapun sisa anggaran sebesar Rp. 101.592.569,- adalah penyerapan maksimal anggaran.
4. Program Pengembangan UMKM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 437.500.000,- penyerapan dan capaian target 0
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.088.260.856,- penyerapan sebesar Rp. 3.827.764.708,- dengan capaian target sebesar 93,63% adapun sisa anggaran sebesar Rp. 260.496.148,- adalah penyerapan maksimal anggaran.
6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan pagu anggaran sebesar Rp. 292.060.000,- penyerapan sebesar Rp. 288.985.656,-

dengan capaian target sebesar 98,94% adapun sisa anggaran sebesar Rp. 3.074.344,- adalah penyerapan maksimal anggaran.

7. Program Pengembangan Ekspor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 160.372.108,- penyerapan sebesar Rp. 73.335.690,- dengan capaian target sebesar 45,73% adapun sisa anggaran sebesar Rp. 87.036.418,- adalah penyerapan maksimal anggaran.
8. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- penyerapan sebesar Rp. 27.335.331,- dengan capaian target sebesar 91,12% adapun sisa anggaran sebesar Rp. 2.664.669,- adalah penyerapan maksimal anggaran.
9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 107.856.000,- penyerapan sebesar Rp. 106.376.600,- dengan capaian target sebesar 98,63% adapun sisa anggaran sebesar Rp. 1.479.400,- adalah penyerapan maksimal anggaran.
10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.715.437.324,- penyerapan sebesar Rp. 2.283.932.209,- dengan capaian target sebesar 48,43% adapun sisa anggaran sebesar Rp. 2.431.505.115,- adalah penyerapan maksimal anggaran.

Berdasarkan data di atas, dari total pagu anggaran Rp. 10.690.409.538,- penyerapan sebesar Rp. 7.327.947.573,- dengan capaian target sebesar 68,54% adapun sisa anggaran sebesar Rp. 3.362.461.965,-.

NO	ANGGARAN APBD	JUMLAH (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN (%)
1.	Belanja Operasi	9.373.348.064	6.111.912.099	65%
2.	Belanja Modal	1.317.061.474	1.216.035.474	92%
Jumlah Total		10.690.409.538	7.327.947.573	68,54%

Lampiran III

Keselarasan Kinerja-Output-Penganggaran

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program			Kegiatan			Anggaran	Realisasi
			Uraian	Sasaran	Indikator	Uraian	Sasaran	Indikator		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik *(Good Governance)* Dan Pemerintahan Yang Bersih *(Clean Government)*	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar	Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar	-Administrasi Umum Perangkat Daerah -Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel	Nilai SAKIP	811.708.909	735.545.849
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	IKM Yang Meningkat Produksi Dan Kualitasnya	Persentase IKM Yang Meningkat Produksi Dan Kualitasnya	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	IKM Yang Meningkat Produksi Dan Kualitasnya	Peningkatan Kapasitas SDM pelaku IKM	4.715.437.324	2.283.932.209

		Industri	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Harga Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Dipantau	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Dipantau	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan publikasi data harga barang pokok dan barang penting	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	292.060.000	288.985.656
			Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pertumbuhan produk ekspor yang dihasilkan oleh UKM	Jumah kemitraan antara pedagang kab.dairi dengan pengusaha di luar kab.dairi	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			160.372.108	73.335.690
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Alat UTTP Yang Sudah Tertib Ukur	Persentase Alat UTTP Yang Sudah Tertib Ukur	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Alat UTTP Yang Tera, Tera Ulang, dan diawasi	30.000.000	27.335.331
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya promosi/pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya promosi,pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah pelaku UMKM yang difasilitasi dalam pelaksanaan promosi,pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	107.856.000	6.376.600

			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	UMKM Dengan Peningkatan Volume Usaha	Persentase UMKM Dengan Peningkatan Volume Usaha	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya pelatihan peningkatan kemitraan terhadap pelaku usaha mikro	Jumlah UMKM yang dibina	595.463.250	493.870.681
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya jumlah SDM pengurus /pengawas/anggota koperasi	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi Yang Terlatih	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan/sosialisasi terhadap pengurus/pengawas/anggota koperasi	Jumlah pengurus/pengawas/anggota koperasi yang mengikuti pelatihan/sosialisasi	206.705.750	177.360.750
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeriksaan/pengawasan terhadap koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah koperasi yang aktif dan melaksanakan RAT	56.754.250	48.985.948

PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN

Permasalahan

Bagian ini menyajikan gambaran analisis terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi yang mempengaruhi kinerja.

1. Masih rendahnya keterkaitan usaha (kemitraan) koperasi dengan usaha lainnya.
2. Masih rendahnya animo masyarakat untuk ikut dalam Koperasi.
3. Belum optimalnya pengendalian koperasi yang tidak sesuai dengan aturannya.
4. Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar).
5. Masih rendahnya kemampuan kewirausahaan masyarakat.
6. Masih rendahnya daya saing produk UMKM.
7. Belum optimalnya kerjasama usaha (kemitraan).
8. Kurangnya daya saing pemasaran produk IKM.
9. Kurangnya sarana dan prasarana produksi pelaku IKM untuk menciptakan produk berkualitas.
10. Belum optimalnya cakupan pelayanan pengembangan industri/perusahaan.
11. Masih rendahnya kemitraan usaha industri/perusahaan.
12. Belum optimalnya kerja sama antara pasar dengan kelompok binaan pemerintah daerah.
13. Belum optimalnya cakupan pelayanan bina kelompok pedagang/usaha informal.
14. Penggunaan alat UTTP belum memenuhi standar kemetrologian.
15. Belum adanya neraca perdagangan.

16. Belum optimalnya cakupan pelayanan informasi harga, komoditas, dan jenis produk.
17. Masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan pasar.

Solusi yang dilakukan

Bagian ini menyajikan gambaran solusi yang dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Dairi.

1. Peningkatan kualitas produk unggulan daerah.
2. Optimalisasi akses dan distribusi barang pokok (33 jenis)
3. Regulasi terkait industri agribisnis.
4. Riset dan inovasi terkait industri agribisnis
5. Tersedianya bahan baku untuk memperlancar proses produksi
6. Peningkatan kapasitas Sosial Marketing dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
7. Peningkatan Kualitas Produk dan Peningkatan Akses Pasar bagi UMKM
8. Peningkatan Manajemen Motivasi, Kreatifitas dalam berwirausaha

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 yakni:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan oleh Bupati Dairi telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi bersama - sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Perda.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan 2 dapat diperoleh dari data – data indikator secara umum masih dijumpai kekurangan dalam penyusunan LKIP ini untuk itu dimohon saran dan buah pikiran yang membangun untuk penyusunan yang lebih sempurna.
4. Diharapkan seluruh staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi bekerja secara maksimal untuk mewujudkan Visi dan Misi yang sudah ditetapkan.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,



IWAN TARUNA BERUTU, ST. M.Si
NIP. 19740402 200312 1 005